

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, internet menjadi salah satu media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh berbagai pihak di dunia. Semenjak tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2017, pengguna internet di Indonesia tercatat terus meningkat dari yang sebelumnya berjumlah 72.800.000 pengguna menjadi 112.600.000 pengguna atau naik sekitar 54,67% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi sumber utama arus lintas informasi yang digunakan di Indonesia. Indonesia sendiri, menduduki peringkat ke-6 pengguna internet terbanyak di dunia setelah China, Amerika Serikat, India, Brazil dan Jepang.

**Tabel 1.1**

**Data Pengguna Internet di Dunia**

No	Negara	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	China	620.700.000	643.600.000	669.800.000	700.100.000	777.000.000
2	Amerika Serikat	246.000.000	252.900.000	259.300.000	264.900.000	269.700.000
3	India	167.200.000	215.600.000	252.300.000	283.800.000	313.800.000
4	Brazil	99.200.000	107.700.000	113.700.000	119.800.000	123.300.000
5	Jepang	100.000.000	102.100.000	103.600.000	104.500.000	115.000.000
6	Indonesia	72.800.000	83.700.000	93.400.000	102.800.000	112.600.000

Sumber: kominfo.go.id

Melihat gejolak penggunaan internet yang semakin meningkat, sebagian besar perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan *go public* semakin menggiatkan penggunaan internet untuk penyampaian informasi perusahaannya melalui *website* / situs resmi masing – masing perusahaan. Hal ini dianggap perlu sebagai perwujudan penyampaian informasi yang berimbang kepada investor maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya. Pemerintah sendiri, melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau yang sekarang dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menerbitkan Peraturan No: 431/BL/2012 pada tanggal 1 agustus 2012 terkait dengan

kewajiban para emiten untuk mempublikasikan laporan tahunannya di *website* / situs internet perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Internet Financial Reporting* (IFR).

OJK memberikan tenggat waktu selama 1 tahun semenjak peraturan ini diterbitkan pada tahun 2012 bagi emiten yang belum memiliki *website* / situs internet untuk membuatnya dan mulai mempublikasikan laporan tahunannya disana. Artinya, semenjak tahun 2013 seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk mempublikasikan laporan tahunannya di *website*-nya masing-masing. Namun, peraturan ini sendiri hanya mewajibkan (*mandatory*) pengungkapan informasi laporan tahunan, sementara informasi lainnya terkait dengan perusahaan masi bersifat sukarela (*voluntary*) atau tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.

Hal ini tentunya akan menimbulkan kesan bahwa pelaporan ini hanya bersifat formalitas saja, karena pada masa awal penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) yakni di tahun 2013 - 2014 masi banyak emiten yang bahkan belum mempunyai *website* perusahaannya sendiri. Selain itu, seringkali ada emiten yang mempublikasikan laporan keuangan yang bahkan belum diaudit dan membatasi penyampaian informasi lainnya. Kurang tegasnya regulator dalam mengawasi kualitas informasi yang ada dalam penerapan IFR menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas. Hal ini tentunya membuat kualitas informasi dari penerapan IFR menjadi tidak reliabel atau tidak dapat diandalkan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi baik buruknya kualitas informasi dari IFR adalah kinerja keuangan. Seringkali, kinerja keuangan menjadi tolak ukur atau dasar pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk memberikan informasinya secara “sempurna” atau “tidak sempurna” kepada pihak eksternal. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rozak (2012) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diprosikan melalui profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penerapan IFR. Hasil serupa juga didapatkan oleh Rahmadiani (2013) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diprosikan melalui profitabilitas, likuiditas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi IFR. Namun hasil yang berbeda didapati dari penelitian M. Riduan (2015) yang menyatakan bahwa Kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi IFR.

Melihat fenomena yang terjadi dan hasil penelitian terdahulu yang cenderung saling bertolak belakang, maka peneliti termotivasi untuk melakukan keterbaharuan riset dengan menambahkan variabel kepemilikan saham oleh publik sebagai variabel moderasi. Kepemilikan saham oleh publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik baik itu secara individual maupun institusi, sepanjang jumlah saham yang dimilikinya dibawah 5%

dari total saham beredar. Artinya, kepemilikan saham ini digunakan untuk tujuan diperdagangkan secara aktif bukan secara pasif (mengharapkan deviden).

Pada dasarnya menurut teori keagenan, semakin menyebar kepemilikan saham terutama kepemilikan saham oleh publik, maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih banyak sehingga biaya keagenan dapat ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku manajemen perusahaan. Mekanisme ini berguna untuk mengendalikan arus dan kualitas informasi yang akan diungkapkan oleh perusahaan. Berdasarkan pada fenomena yang telah dijabarkan dan juga hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kualitas Informasi Internet Financial Reporting dengan Kepemilikan Saham Oleh Publik Sebagai Variabel Moderasi.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah kepemilikan saham oleh publik mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan kualitas informasi *Internet Financial Reporting* perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?